

Tantangan dan Strategi Optimalisasi Informasi Intelijen Kepolisian dalam Mitigasi Kejahatan Maritim

Challenges and Strategies for Optimizing Police Intelligence in Maritime Crime Mitigation

Febriadi Silvano Muabuay, M. Kemalsyah, Haposan Simatupang

Prodi SPU, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI
Febriadi.silvano@gmail.com

Abstrak. Wilayah Maritim Kalimantan Timur memiliki posisi strategis namun rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan maritim, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan ilegal, dan perompakan. Di sisi lain, kegiatan kepolisian yaitu deteksi dini dan kegiatan intelijen serta laporan informasi intelijen yang dijalankan oleh Seksi Intel Subdit Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Timur belum maksimal untuk mencegah dan mengantisipasi ancaman berbagai kejahatan di wilayah maritim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi optimalisasi laporan informasi intelijen Polri guna mengantisipasi potensi ancaman di wilayah Ditpolairud Polda Kalimantan Timur. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dari referensi maupun literatur yang berhubungan dengan peran Ditpolairud. Metode dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang mengungkap bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan diseminasi informasi yang belum terintegrasi dan belum ditunjang SDM serta infrastruktur yang memadai. Tujuan dari penelitian adalah bahwa strategi penguatan kapasitas SDM intelijen, pemanfaatan teknologi modern, serta sinergi lintas lembaga dapat mengoptimalkan kualitas laporan informasi intelijen guna memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi ancaman kejahatan di Wilayah Maritim Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Intelijen, Polairud, Keamanan Maritim. Abstract.

The maritime territory of East Kalimantan has a strategic position but is vulnerable to various forms of maritime crime, such as drug smuggling, illegal trade, and piracy. On the other hand, police activities such as early detection, intelligence activities, and intelligence information reporting conducted by the Intelligence Section of the Law Enforcement Sub-Directorate (Subdit Gakkum) of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of East Kalimantan Police have not been maximized to prevent and anticipate threats from various crimes in the maritime area. This research aims to identify constraints and formulate strategies to optimize the intelligence information reports of the National Police to anticipate potential threats in the Ditpolairud East Kalimantan Police region. This article uses a qualitative approach with data sources obtained from interviews, observations, and references or literature related to the role of Ditpolairud. The method in this research is qualitative, revealing that the main problem lies in the weak planning system, data collection, analysis, and dissemination of information that has not been integrated and is not supported by adequate human resources and infrastructure. From this research, it is found that the strategy of strengthening the capacity of intelligence human resources, utilizing modern technology, and cross-agency synergy can optimize the quality of intelligence information reports to strengthen early detection and rapid response to potential criminal threats in the Maritime Region of East Kalimantan.

Keywords: Intelligence, Polairud, Maritime Security.

1. Pendahuluan

Wilayah Maritim Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam aspek ekonomi, keamanan, serta kedaulatan negara, mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional dan wilayah-wilayah rawan kejahatan transnasional. Berbagai ancaman seperti penyelundupan narkoba, perdagangan ilegal, perompakan, hingga eksploitasi sumber daya laut secara ilegal menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kalimantan Timur. Dalam upaya menghadapi ancaman ini, intelijen kepolisian memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi strategis yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kualitas laporan informasi intelijen guna

memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi ancaman kejahatan di Wilayah Maritim Kalimantan Timur.

Optimalisasi laporan informasi intelijen Polri di lingkungan Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur menjadi sebuah keharusan dalam konteks penguatan keamanan maritim dan efektivitas penegakan hukum di Wilayah Maritim. Dalam praktiknya, penyusunan laporan intelijen yang akurat, cepat, dan komprehensif sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk penggunaan teknologi pemantauan modern, kemampuan personel dalam analisis intelijen, serta dukungan kebijakan yang memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, integrasi sistem intelijen juga menjadi tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pencegahan dan penindakan kejahatan di maritim (Anwar, 2018).

Intelijen kepolisian di lingkungan Polairud Polda Kalimantan Timur berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan laporan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam operasi keamanan laut. Meskipun demikian, sejumlah faktor masih menghambat optimalisasi laporan intelijen, seperti pertama, keterbatasan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam intelijen maritim, Kedua, keterbatasan infrastruktur dan teknologi pemantauan, dan ketiga, Kurangnya akurasi serta keterlambatan dalam penyampaian laporan informasi intelijen juga menjadi tantangan yang dapat melemahkan efektivitas respons Polairud terhadap ancaman kejahatan di wilayah maritim. Dengan optimalnya kompleksitas ancaman maritim, diperlukan optimalisasi laporan informasi intelijen yang lebih akurat, cepat, dan berbasis teknologi guna mengoptimalkan strategi keamanan wilayah maritim di Kalimantan Timur.

Selain faktor internal, terdapat juga tantangan eksternal yang mempengaruhi efektivitas intelijen Polri di sektor wilayah maritim, seperti dinamika geopolitik yang menyebabkan meningkatnya aktivitas ilegal oleh jaringan kejahatan

transnasional serta pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Kelemahan dalam sistem pelaporan intelijen dapat berakibat pada meningkatnya celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk melancarkan aksi mereka. Oleh karena itu, perbaikan dan penguatan sistem laporan intelijen bukan hanya menjadi kebutuhan internal Polairud, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan.

Dihadapkan pada ketiga permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat di implementasikan diantaranya melalui pertama, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Intelijen Maritim, kedua Peningkatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi intelejen modern yang Canggih dan ketiga Digitalisasi dan Percepatan Proses Pengolahan serta Distribusi Laporan Intelijen. Sehingga demi mencapai efektivitas dalam optimalisasi laporan intelijen, diperlukan kajian mendalam mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem koordinasi lintas lembaga, hingga aspek regulasi yang mengatur mekanisme kerja intelijen di lingkungan kepolisian perairan. Dengan memahami secara komprehensif faktor-faktor yang menghambat optimalisasi laporan intelijen, dapat dirancang langkah-langkah strategis yang tidak hanya optimalkan kualitas laporan, tetapi juga memperkuat kemampuan Polairud dalam mengantisipasi serta menindak kejahatan di wilayah maritim secara lebih efektif.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan dalam optimalisasi laporan informasi intelijen Polri di Wilayah Maritim Kalimantan Timur serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas sistem intelijen dalam mendukung keamanan maritim. Dengan adanya perbaikan sistemik dalam laporan intelijen, diharapkan Polairud Polda Kalimantan Timur dapat lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang.

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi terdahulu yang relevan untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya penguatan laporan informasi intelijen Polri dalam menghadapi ancaman kejahatan di Wilayah Maritim Kalimantan Timur. Penelitian Sanjaya (2024) berfokus pada efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Perairan terhadap tindak pidana perompakan kapal, menekankan strategi patroli dan kerja sama lintas lembaga sebagai tindakan represif. Di sisi lain, Kudussalam (2024) menyoroti pentingnya sinergisitas antar-instansi, seperti Ditpolairud, KKP, dan TNI AL dalam pengawasan terhadap nelayan asing sebagai bentuk kolaborasi pengawasan maritim. Selain itu, Prasetyo (2023) mengulas strategi patroli udara oleh Ditpolairud dalam mempercepat respons terhadap ancaman dan mengoptimalkan efektivitas pengawasan wilayah maritim. Keempatnya memperlihatkan berbagai upaya dalam mengamankan Wilayah Maritim Indonesia, tetapi lebih menekankan pada aspek penegakan hukum langsung, patroli fisik, dan koordinasi eksternal, bukan pada aspek sistem pelaporan informasi intelijen yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Lebih lanjut, penelitian oleh Winata (2022) mengenai kewenangan penyidikan Ditpolairud Polda Lampung dalam menangani kasus narkoba menunjukkan urgensi peran Polairud dalam memberantas kejahatan transnasional, terutama di jalur laut. Sementara itu, Kuncorojati (2020) menyoroti peran Ditpolairud dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan untuk mencegah penyimpangan ekonomi di Wilayah Maritim Kalimantan Barat. Kedua penelitian ini memberikan kontribusi dalam menggambarkan luasnya peran Ditpolairud, baik dalam aspek hukum maupun ekonomi, namun belum secara spesifik mengkaji efektivitas sistem intelijen sebagai landasan awal dari semua kegiatan operasional tersebut. Gap yang dapat diidentifikasi adalah belum adanya kajian mendalam mengenai bagaimana laporan informasi intelijen disusun, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pencegahan ancaman kejahatan

maritim, serta bagaimana kelemahan sistemik dalam pelaporan dapat menimbulkan celah keamanan.

Oleh karena itu, novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada penguatan sistem laporan informasi intelijen Polri di Wilayah Maritim Kalimantan Timur sebagai langkah preventif dalam menghadapi dinamika kejahatan maritim yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Tidak hanya mengkaji aspek teknis penyusunan laporan, penelitian ini juga membahas keterkaitan antara kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi modern, digitalisasi sistem pelaporan, serta mekanisme koordinasi lintas lembaga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan inti dalam pelaporan intelijen, menganalisis faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat diimplementasikan secara sistemik guna memperkuat keamanan dan kedaulatan negara di Wilayah Maritim strategis Kalimantan Timur.

2. Tinjauan Pustaka

a. Intelligence Cycle Theory.

Intelligence Cycle Theory sebagaimana yang dikemukakan oleh Sherman Kent (1991) menjelaskan bahwa proses intelijen merupakan siklus sistematis yang terdiri dari enam tahap utama, yaitu perencanaan dan pengarahan (planning & direction), pengumpulan data (collection), pemrosesan (processing), analisis dan produksi (analysis & production), diseminasi (dissemination), serta penggunaan dan evaluasi (utilization & feedback). Siklus ini menekankan bahwa intelijen bukan hanya sekadar pengumpulan informasi mentah, tetapi juga melibatkan proses analisis yang mendalam untuk menghasilkan laporan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Perencanaan menentukan fokus dan prioritas intelijen berdasarkan kebutuhan operasional, sedangkan

pengumpulan data melibatkan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, atau pemanfaatan teknologi canggih. Setelah dikumpulkan, data diproses melalui penyaringan dan kategorisasi untuk memastikan validitasnya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut guna mengidentifikasi pola atau tren yang berpotensi menjadi ancaman. Hasil analisis ini kemudian didistribusikan kepada pihak terkait, seperti pemimpin operasional atau pembuat kebijakan, untuk diimplementasikan dalam strategi keamanan yang lebih efektif. Siklus ini berlanjut dengan evaluasi efektivitas laporan intelijen, di mana umpan balik digunakan untuk meningkatkan metode pengumpulan dan analisis di tahap selanjutnya.

Dalam konteks kajian “Optimalisasi Laporan Informasi Intelijen Polri untuk Mengantisipasi Potensi Ancaman Kejahatan di Wilayah Maritim Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur”, teori ini menjadi pisau analisis yang relevan dalam menilai efektivitas laporan intelijen dalam menghadapi tantangan keamanan maritim. Setiap indikator dalam siklus intelijen memiliki korelasi langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh Polairud, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengumpulan dan analisis data (pengaruh pada tahap collection dan processing), keterbatasan teknologi pemantauan laut (berdampak pada collection), serta lambatnya distribusi laporan intelijen kepada unit operasional (berpengaruh pada dissemination dan utilization & feedback). Selain itu, permasalahan dalam koordinasi antar-lembaga juga menghambat tahap dissemination, yang menyebabkan respons terhadap ancaman di wilayah maritim menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan Intelligence Cycle Theory untuk mengidentifikasi titik lemah dalam setiap tahap siklus intelijen di lingkungan Polairud Polda Kalimantan Timur serta merumuskan solusi yang dapat mengoptimalkan efektivitas laporan informasi intelijen guna memperkuat keamanan maritim di wilayah tersebut.

b. Teori Keamanan Maritim.

Teori Keamanan Maritim sebagaimana yang dikemukakan oleh Christian Bueger (2015) mendefinisikan keamanan maritim sebagai upaya untuk melindungi ruang maritim dari berbagai ancaman, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, yang dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan kedaulatan suatu negara. Dalam teorinya, Bueger membagi keamanan maritim ke dalam empat pilar utama, yaitu National Security (Keamanan Nasional), Marine Safety (Keselamatan Maritim), Blue Economy (Ekonomi Biru), dan Human Security (Keamanan Manusia). Pilar National Security berfokus pada perlindungan wilayah maritim dari ancaman eksternal seperti invasi, penyelundupan senjata, atau kejahatan transnasional. Marine Safety berkaitan dengan keselamatan navigasi, pencegahan kecelakaan laut, dan pengelolaan risiko lingkungan maritim. Blue Economy menyoroti aspek pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem, sedangkan Human Security menekankan perlindungan masyarakat pesisir dari ancaman kejahatan maritim seperti perompakan, perdagangan manusia, serta eksploitasi sumber daya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam teori ini, keamanan maritim bukan hanya tugas angkatan laut atau aparat keamanan, tetapi juga memerlukan koordinasi berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, akademisi, industri perikanan, serta komunitas maritim (Yusnaldi, 2022).

Dalam konteks kajian “Optimalisasi Laporan Informasi Intelijen Polri untuk Mengantisipasi Potensi Ancaman Kejahatan di Wilayah Maritim Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur”, teori ini menjadi pisau analisis yang membantu memahami bagaimana optimalisasi laporan intelijen Polri dapat memperkuat keamanan maritim, khususnya dalam menghadapi ancaman seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan perdagangan

manusia. Indikator dalam teori Bueger dapat dikorelasikan dengan kajian ini, di mana National Security relevan dengan kebutuhan intelijen dalam mendeteksi ancaman transnasional di wilayah maritim Kalimantan Timur. Marine Safety terkait dengan perlunya laporan intelijen yang akurat guna mencegah kecelakaan atau insiden keamanan laut yang berpotensi membahayakan pelayaran. Blue Economy menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya maritim ilegal yang dapat merugikan negara, sementara Human Security berkaitan dengan bagaimana intelijen Polri dapat membantu mencegah kejahatan yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis peran laporan intelijen dalam mengoptimalkan keamanan maritim dan memastikan bahwa sistem intelijen Polairud berjalan efektif dalam mengantisipasi ancaman yang berkembang di Wilayah Maritim Kalimantan Timur.

c. Teori Pemberdayaan SDM Berbasis Resource-Based View (RBV).

Teori Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Jay Barney (2001) menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi bergantung pada bagaimana organisasi tersebut mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, serta infrastruktur. Barney menekankan bahwa sumber daya dalam organisasi harus memenuhi empat karakteristik utama (VRIN): Valuable (Bernilai), Rare (Langka), Inimitable (Sulit Ditiru), dan Non-substitutable (Tidak Mudah Digantikan). Dalam konteks pemberdayaan SDM, RBV menekankan bahwa investasi dalam peningkatan kompetensi individu dan organisasi akan menciptakan keunggulan jangka panjang. Organisasi yang mampu mengembangkan SDM dengan keterampilan khusus, misalnya melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman praktis, akan

memiliki kapabilitas unik yang sulit disaingi oleh pesaing atau organisasi lain. Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam kajian “Optimalisasi Laporan Informasi Intelijen Polri untuk Mengantisipasi Potensi Ancaman Kejahatan di Wilayah Maritim Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur”, teori RBV menjadi pisau analisis yang relevan dalam mengkaji bagaimana optimalisasi SDM intelijen di lingkungan Polairud dapat mengoptimalkan efektivitas laporan informasi intelijen. Indikator dalam teori ini dapat dikorelasikan dengan kajian ini, di mana Valuable berarti kompetensi SDM dalam analisis intelijen harus memiliki nilai tinggi dalam mengoptimalkan keamanan wilayah maritim. Rare menunjukkan bahwa tidak semua personel Polri memiliki keterampilan intelijen maritim yang spesifik, sehingga diperlukan pelatihan khusus. Inimitable menekankan bahwa keahlian dalam intelijen maritim tidak mudah ditiru tanpa pengalaman dan pelatihan berkelanjutan, sehingga optimalisasi SDM harus menjadi prioritas. Non-substitutable menegaskan bahwa SDM berkualitas dalam intelijen tidak dapat digantikan hanya dengan teknologi tanpa adanya analisis berbasis manusia yang kritis. Dengan demikian, teori ini membantu dalam menganalisis betapa pentingnya peningkatan kapasitas SDM Polairud dalam pengolahan informasi intelijen, termasuk melalui pelatihan lanjutan, penggunaan teknologi pendukung, dan strategi manajemen SDM yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem intelijen dalam menghadapi ancaman di wilayah maritim Kalimantan Timur.

d. Teori Peran.

Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2009) menjelaskan bahwa peran merupakan serangkaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial, yang bertujuan untuk mencapai stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Soekanto, terdapat tiga aspek utama dalam teori peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*), peran yang dijalankan (*enacted role*), dan peran yang ideal (*ideal role*). Peran yang diharapkan adalah ekspektasi masyarakat atau institusi terhadap individu atau kelompok dalam menjalankan tugasnya. Peran yang dijalankan merupakan realitas yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Sementara itu, peran yang ideal merupakan bentuk peran yang seharusnya dijalankan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku. Teori ini menekankan bahwa ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan peran dapat menyebabkan ketidakefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa individu atau institusi menjalankan perannya dengan efektif melalui peningkatan kapasitas, dukungan infrastruktur, dan optimalisasi mekanisme kerja.

Dalam konteks kajian “Optimalisasi Laporan Informasi Intelijen Polri untuk Mengantisipasi Potensi Ancaman Kejahatan di Wilayah Maritim Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur”, teori peran menjadi pisau analisis dalam menilai bagaimana peran Polairud dalam menjalankan tugas intelijen keamanan wilayah maritim dan sejauh mana kesenjangan antara *expected role*, *enacted role*, dan *ideal role* terjadi dalam praktiknya. *Expected role* dalam konteks ini adalah peran yang diharapkan dari Polairud sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan maritim, termasuk dalam pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi intelijen. *Enacted role* mencerminkan realitas di lapangan, di mana laporan intelijen sering kali

terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan koordinasi lintas lembaga. Ideal role adalah peran yang seharusnya dijalankan oleh Polairud dengan sistem laporan intelijen yang cepat, akurat, berbasis teknologi, dan didukung oleh regulasi yang kuat. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan teori peran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas dalam kinerja intelijen Polairud serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas laporan intelijen dalam mengantisipasi ancaman kejahatan di wilayah maritim Kalimantan Timur.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2011), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan, melalui pengumpulan data dalam konteks alamiah dan analisis data secara induktif. Jenis penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai permasalahan optimalisasi laporan informasi intelijen Polri dalam mengantisipasi potensi ancaman kejahatan di Wilayah Maritim Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur. Subjek penelitian terdiri dari personel intelijen Polairud, pejabat struktural di lingkungan Polda Kaltim, serta pihak terkait dari lembaga yang bekerja sama dalam pengawasan wilayah maritim, sedangkan objek penelitian adalah sistem dan mekanisme penyusunan laporan informasi intelijen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, observasi situasi maritim di wilayah Kalimantan Timur dan dari referensi maupun studi literatur terhadap dokumen kebijakan dan teori yang relevan, serta dokumentasi terhadap laporan-laporan intelijen yang telah disusun sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola, kategori, dan tema-tema penting yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap persiapan dan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data di lapangan, reduksi dan penyajian data, penarikan kesimpulan sementara, validasi data melalui triangulasi, hingga penyusunan laporan akhir yang memuat hasil temuan, pembahasan, dan rekomendasi strategis untuk optimalisasi kualitas laporan informasi intelijen Polairud dalam mendukung keamanan maritim di Kalimantan Timur.

4. Pembahasan

- a. Kendala dan tantangan laporan intelijen mengantisipasi potensi ancaman kejahatan di Wilayah Maritim Ditpolairud Polda Kaltim.

Wilayah Maritim Kalimantan Timur yang strategis, karena berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional dan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, menuntut adanya sistem intelijen kepolisian yang tangguh dan responsif. Dalam konteks ini, laporan informasi intelijen menjadi elemen vital untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman secara dini. Untuk menelaah berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan intelijen di lingkungan Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur, digunakan pisau analisis Intelligence Cycle Theory yang dikemukakan oleh Sherman Kent (1991), yang menjelaskan bahwa proses intelijen merupakan rangkaian sistematis yang melibatkan enam tahap saling berkelanjutan. Melalui pendekatan teori ini, dapat diidentifikasi titik-titik kritis yang menghambat optimalisasi laporan intelijen serta dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memperkuat keamanan maritim secara menyeluruh.

Dalam konteks perencanaan dan pengarahan (planning & direction) sebagaimana dijelaskan oleh Sherman Kent (1991), salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur adalah belum optimalnya identifikasi kebutuhan intelijen yang bersifat spesifik dan berbasis risiko aktual di lapangan. Kurangnya kajian strategis

yang terintegrasi dengan data ancaman maritim menjadikan perencanaan intelijen masih bersifat reaktif, bukan antisipatif. Selain itu, perencanaan sering kali tidak sinkron dengan dinamika geopolitik serta tren kejahatan transnasional yang terus berkembang di Wilayah Maritim Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan dalam pelibatan unit-unit lapangan dalam proses penentuan prioritas intelijen, sehingga arah kebijakan pelaporan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan taktis di lapangan.

Tahap pengumpulan data (collection) menjadi titik krusial yang sangat terdampak oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi personel intelijen maritim. Banyak anggota yang belum memiliki keahlian khusus dalam teknik pengumpulan data berbasis laut, termasuk penggunaan teknologi pengawasan modern seperti drone, satelit, atau perangkat pemantauan otomatis. Selain itu, metode pengumpulan data masih mengandalkan teknik konvensional seperti wawancara dan pengamatan langsung, yang rentan terhadap bias dan keterbatasan jangkauan. Akses informasi dari pihak eksternal, seperti nelayan, operator kapal, maupun lembaga mitra, juga belum terbangun secara sistematis, sehingga banyak potensi informasi penting yang luput dari proses pengumpulan.

Dalam tahap pemrosesan (processing), tantangan yang muncul berkaitan erat dengan keterbatasan sistem digital dan teknologi pendukung dalam menyaring, mengelompokkan, serta memvalidasi informasi mentah. Banyak data lapangan yang tidak terdokumentasi dengan baik atau terlambat masuk ke sistem, sehingga memperlambat proses penyaringan dan klasifikasi informasi. Ketergantungan pada proses manual menjadikan potensi kesalahan manusia (human error) cukup tinggi, terutama dalam kondisi darurat atau operasi dengan tekanan waktu yang besar. Selain itu, kurangnya

sistem integrasi antara data internal Polairud dengan data instansi lain seperti TNI AL, Bakamla, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat validitas informasi menjadi sulit diverifikasi secara cepat dan akurat.

Pada tahap analisis dan produksi (*analysis & production*), masalah utama terletak pada kemampuan personel dalam menginterpretasi data mentah menjadi laporan yang bernilai strategis dan operasional (Halkis, 2022). Rendahnya pelatihan khusus analisis intelijen menyebabkan banyak laporan masih bersifat deskriptif dan kurang menggambarkan pola ancaman, kecenderungan, atau prediksi yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan. Selain itu, kurangnya alat bantu analisis berbasis teknologi seperti *software* intelijen, AI, atau GIS (*geographic information system*) menyebabkan proses analisis menjadi lambat dan tidak komprehensif. Hasil akhirnya adalah laporan intelijen yang belum mampu menjawab kebutuhan operasional secara presisi dan cepat, apalagi dalam konteks wilayah maritim yang sangat dinamis dan sulit dijangkau.

Distribusi laporan (*dissemination*) juga menjadi titik lemah yang signifikan dalam siklus intelijen di lingkungan Polairud Polda Kaltim. Banyak laporan yang terlambat disampaikan kepada unit operasional di lapangan, baik karena kendala teknis seperti jaringan komunikasi yang tidak stabil di Wilayah Maritim, maupun karena belum adanya sistem informasi yang mendukung distribusi laporan secara *real-time*. Keterlambatan ini membuat respons terhadap ancaman menjadi tidak efektif, bahkan dalam beberapa kasus, laporan kehilangan relevansinya saat sampai ke pihak pelaksana. Selain itu, keterbatasan dalam standarisasi format laporan menyebabkan perbedaan interpretasi informasi oleh unit penerima yang berbeda-beda.

Dalam tahap pemanfaatan dan evaluasi (*utilization & feedback*), kelemahan terletak pada tidak adanya mekanisme sistematis untuk mengevaluasi efektivitas laporan intelijen yang telah digunakan dalam

operasi keamanan laut. Umpan balik dari lapangan terkait akurasi dan kegunaan laporan jarang dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas laporan. Selain itu, tidak adanya sistem pelacakan yang mampu memetakan sejauh mana laporan digunakan dalam pengambilan keputusan membuat Polairud sulit menilai kinerja unit intelijen secara objektif. Hal ini mengakibatkan siklus intelijen tidak berjalan utuh, karena evaluasi dan perbaikan tidak masuk kembali ke dalam perencanaan dan pengarahan di tahap awal.

Tantangan lain yang tidak kalah penting dalam keseluruhan siklus adalah koordinasi lintas lembaga. Ketidaksinkronan antara instansi penegak hukum maritim menyebabkan tumpang tindih informasi, lemahnya pertukaran data, dan minimnya integrasi sistem intelijen. Masing-masing lembaga cenderung bekerja secara sektoral tanpa ada platform bersama untuk berbagi data yang valid dan real-time. Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur mekanisme integrasi sistem intelijen antar-lembaga turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, banyak potensi ancaman tidak terdeteksi secara komprehensif karena informasi terpecah-pecah dan tidak dikonsolidasikan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesis bahwa kelemahan dalam laporan informasi intelijen Polri di Wilayah Maritim Kalimantan Timur terletak pada hampir semua tahap siklus intelijen, mulai dari perencanaan yang belum berbasis risiko, pengumpulan dan pemrosesan data yang terbatas oleh sumber daya dan teknologi, analisis yang belum mendalam, hingga diseminasi dan pemanfaatan laporan yang tidak optimal serta minim evaluasi. Ditambah dengan lemahnya koordinasi lintas lembaga, menjadikan upaya deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman kejahatan maritim belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi strategi berbasis siklus intelijen yang lebih adaptif, modern, dan terintegrasi guna

memperkuat posisi Ditpolairud Polda Kalimantan Timur dalam menjaga keamanan wilayah maritim nasional.

b. Peran teknologi dan infrastruktur dalam mendukung optimalisasi laporan informasi intelijen di lingkungan Ditpolairud Polda Kaltim.

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman kejahatan maritim di Wilayah Maritim Kalimantan Timur, pemanfaatan teknologi dan penguatan infrastruktur menjadi kunci penting untuk mendukung efektivitas laporan informasi intelijen di lingkungan Direktorat Polairud Polda Kaltim. Untuk menganalisis hal ini secara mendalam, digunakan dua pendekatan teori yaitu teori peran oleh Soerjono Soekanto (2009) dan Teori Keamanan Maritim oleh Christian Bueger (2015). Teori Peran menekankan pentingnya pemenuhan ekspektasi sosial dan institusional terhadap suatu jabatan atau fungsi tertentu, dalam hal ini peran strategis intelijen kepolisian perairan. Sementara itu, Teori keamanan maritim oleh Bueger menyatakan bahwa keamanan laut tidak hanya berkaitan dengan tindakan militer atau penegakan hukum, tetapi juga dengan kemampuan untuk memahami, memantau, dan merespons dinamika di laut secara terpadu. Dalam konteks ini, teknologi dan infrastruktur menjadi bagian integral dari strategi keamanan maritim dan efektivitas peran intelijen.

Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, peran intelijen di lingkungan Ditpolairud Polda Kaltim harus dijalankan secara profesional sesuai dengan ekspektasi normatif dan fungsional dari institusi kepolisian serta masyarakat. Untuk menjalankan peran tersebut secara maksimal, maka personel intelijen memerlukan dukungan teknologi canggih seperti sistem pemantauan laut berbasis satelit, radar pantai, perangkat pelacakan kapal (AIS), serta perangkat pengumpulan data otomatis. Sayangnya, infrastruktur pendukung tersebut masih belum merata dan sering kali terbatas pada wilayah tertentu saja, sehingga membatasi jangkauan dan kualitas informasi

yang dapat dikumpulkan. Ketika teknologi tidak tersedia atau tidak berfungsi optimal, maka peran intelijen tidak dapat dijalankan sesuai dengan harapan, yang berujung pada menurunnya efektivitas laporan intelijen.

Selanjutnya, teori keamanan maritim Bueger menekankan pentingnya maritime domain awareness (kesadaran situasi laut), di mana teknologi menjadi alat penting dalam mendeteksi, memantau, dan memahami aktivitas di wilayah laut. Dalam konteks Ditpolairud Polda Kaltim, penggunaan teknologi seperti drone laut, kamera pengawas lepas pantai, dan pemetaan digital berbasis GIS dapat meningkatkan akurasi laporan intelijen karena memungkinkan pemantauan secara real-time. Namun, keterbatasan infrastruktur jaringan komunikasi laut menjadi kendala utama dalam transmisi data secara cepat dan aman. Akibatnya, informasi yang seharusnya dapat segera dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan, menjadi tertunda dan kehilangan relevansinya.

Menurut Soekanto, peran seseorang atau institusi tidak hanya ditentukan oleh tugas formalnya, tetapi juga oleh kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, penggunaan sistem informasi berbasis digital seperti command center, integrated maritime intelligence system, dan aplikasi analisis data berbasis AI menjadi suatu keniscayaan bagi Polairud dalam mengoptimalkan kualitas laporan intelijen. Namun, masih banyak personel yang belum terlatih dalam menggunakan perangkat digital tersebut secara maksimal. Ketidaksiapan SDM ini menimbulkan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan implementasi di lapangan, sehingga peran teknologi belum mampu mendorong optimalisasi laporan intelijen secara signifikan.

Dari sisi Bueger, keamanan maritim juga ditentukan oleh collaborative capacity, yakni kemampuan untuk bekerja sama lintas lembaga dan negara. Dalam hal ini, teknologi menjadi sarana penghubung antar-pemangku

kepentingan seperti TNI AL, Bakamla, KKP, dan bahkan mitra internasional. Sayangnya, sistem informasi yang digunakan masing-masing instansi sering kali tidak kompatibel satu sama lain karena perbedaan platform dan standar operasional. Hal ini menyebabkan fragmentasi data intelijen, yang pada akhirnya menghambat efektivitas diseminasi dan pemanfaatan laporan intelijen secara terpadu.

Teori peran juga menekankan pentingnya struktur dan fasilitas pendukung dalam menjalankan peran secara efektif. Infrastruktur seperti pusat data intelijen, jaringan komunikasi bawah laut, serta stasiun pengawasan tetap dan bergerak belum sepenuhnya tersedia di seluruh titik strategis Wilayah Maritim Kalimantan Timur. Tanpa dukungan fisik yang memadai, maka peran intelijen dalam mengolah dan melaporkan informasi secara cepat dan akurat akan terus terkendala. Dengan demikian, peran yang seharusnya dijalankan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini menjadi tidak maksimal akibat hambatan infrastruktur dasar.

Dari sudut pandang Bueger, keamanan laut adalah hasil dari proses manajemen informasi yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan teknologi penyimpanan cloud, pengamanan data, dan algoritma pengolahan big data dapat memberikan keunggulan taktis dan strategis dalam pengambilan keputusan oleh Polairud. Namun, aspek keamanan siber dan kerahasiaan data intelijen belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur intelijen di Kalimantan Timur. Ini menjadi celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan transnasional yang kini juga telah memanfaatkan teknologi canggih untuk menghindari deteksi.

Dihadapkan pada analisis tersebut, dapat disintesis bahwa peran teknologi dan infrastruktur sangat menentukan kualitas dan efektivitas laporan informasi intelijen di lingkungan Ditpolairud Polda Kalimantan Timur. Keterbatasan alat pengawasan laut, ketidaksiapan SDM, minimnya

jaringan komunikasi, serta kurangnya integrasi sistem lintas lembaga menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan laporan intelijen yang cepat, akurat, dan bernilai strategis. Maka dari itu, upaya modernisasi teknologi dan penguatan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar peran intelijen dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan zaman serta mendukung keamanan maritim secara komprehensif dan kolaboratif.

c. Strategi untuk mengoptimalkan kualitas dan kecepatan laporan informasi intelijen Polri guna pencegahan serta respons cepat terhadap ancaman kejahatan di Wilayah Maritim Ditpolairud Polda Kaltim.

Menghadapi berbagai tantangan kejahatan maritim di Wilayah Maritim Kalimantan Timur, optimalisasi kualitas dan kecepatan laporan informasi intelijen menjadi suatu keharusan strategis bagi Direktorat Polairud Polda Kalimantan Timur. Untuk menyusun strategi optimalisasi tersebut, digunakan dua pisau analisis teoritis: Intelligence Cycle Theory oleh Sherman Kent (1991) dan Resource-Based View (RBV) oleh Jay Barney (2001). Kedua teori ini saling melengkapi, di mana Kent menekankan pentingnya optimalisasi tiap tahapan siklus intelijen secara sistematis, sedangkan Barney menyoroti peran krusial sumber daya internal, khususnya SDM dan teknologi, dalam menciptakan keunggulan operasional dan daya saing institusional. Dengan menggunakan dua perspektif ini, strategi dapat dibangun tidak hanya untuk merespons kejahatan secara cepat dan tepat, tetapi juga untuk membangun sistem intelijen yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Strategi pertama dimulai dari tahap planning & direction dengan membentuk tim perencana intelijen yang dilengkapi dengan perangkat analisis berbasis data, termasuk predictive analytics untuk memetakan potensi ancaman maritim. Berdasarkan Intelligence Cycle Theory,

perencanaan yang berbasis kebutuhan aktual dan data historis akan menghasilkan fokus intelijen yang lebih presisi. Selaras dengan RBV, hal ini menuntut SDM yang memiliki keahlian dalam intelijen strategis dan analisis kebijakan, sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi personel perencanaan. Selain itu, perlu adanya integrasi sistem perencanaan dengan pusat data nasional dan instansi terkait guna mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policing).

Tahap collection dapat diperkuat dengan penggunaan teknologi pemantauan laut seperti radar coastal surveillance system, drone laut, serta penguatan jaringan komunikasi laut. Berdasarkan teori Kent, pengumpulan data harus cepat, akurat, dan kontinu. Namun untuk mencapai ini, teori RBV menekankan pentingnya investasi dalam SDM operator teknologi yang andal serta penyediaan sistem teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga sesuai kebutuhan lokal. Polairud perlu mengembangkan kompetensi personel dalam mengoperasikan dan memelihara perangkat pemantauan serta membangun kemitraan strategis dengan lembaga lain yang memiliki data kemaritiman seperti Bakamla dan KKP untuk memperluas jangkauan informasi.

Pada tahap processing, strategi dapat diarahkan pada digitalisasi proses pemrosesan informasi menggunakan sistem pengolahan data intelijen otomatis berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Big Data. Dalam kerangka RBV, teknologi pemrosesan data ini menjadi aset tidak tergantikan apabila dikombinasikan dengan personel yang memiliki keahlian analisis data. Kent menyebut bahwa penyaringan dan kategorisasi informasi mentah menjadi langkah penting untuk memastikan validitas sebelum dianalisis. Maka, pelatihan SDM dalam data filtering, data mining, serta keamanan siber perlu menjadi bagian integral dari strategi penguatan proses ini.

Tahap analysis & production menuntut optimalisasi kapasitas analitis SDM untuk menyusun laporan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan prediktif. Intelligence Cycle Theory menggarisbawahi pentingnya menghasilkan intelijen yang dapat dijadikan dasar keputusan strategis, sedangkan RBV menyarankan pengembangan kapabilitas intelektual organisasi melalui pelatihan lanjutan, sertifikasi profesi, dan simulasi kasus intelijen maritim. Dengan menerapkan metode intelligence fusion center, Polairud dapat mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi satu laporan komprehensif yang mudah dipahami dan cepat digunakan oleh pengambil keputusan.

Untuk tahap dissemination, strategi utama adalah membangun sistem distribusi laporan intelijen yang terintegrasi, aman, dan berbasis real-time, seperti melalui aplikasi mobile intelijen yang dilengkapi sistem enkripsi dan pelacakan penerima. Menurut Kent, kecepatan distribusi sangat menentukan respons operasional. Dalam pandangan RBV, sistem ini menjadi sumber daya strategis apabila dikelola dengan baik dan tidak mudah ditiru oleh organisasi lain. Personel Polairud perlu dibekali dengan pelatihan penggunaan sistem distribusi digital dan prosedur komunikasi darurat untuk memastikan laporan sampai ke unit operasional tepat waktu dan dalam kondisi siap pakai.

Pada tahap utilization & feedback, diperlukan strategi monitoring efektivitas penggunaan laporan intelijen di lapangan melalui sistem feedback loop yang terintegrasi. Teori Kent menyebutkan bahwa tanpa evaluasi, siklus intelijen tidak akan berkembang, sementara RBV menekankan bahwa informasi umpan balik adalah sumber daya penting untuk pembelajaran organisasi. Dengan membentuk satuan evaluasi kinerja intelijen, Ditpolairud dapat memetakan sejauh mana laporan digunakan, kendala

implementasinya, dan bagaimana laporan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dinamis wilayah maritim Kalimantan Timur.

Akhirnya, untuk menjaga kesinambungan sistem intelijen, strategi makro yang melibatkan penguatan struktur organisasi intelijen, sinergi antarlembaga, serta penganggaran berbasis kebutuhan intelijen jangka panjang menjadi keharusan. Dalam kerangka RBV, organisasi perlu memastikan bahwa seluruh sistem, teknologi, dan SDM intelijen dikelola secara strategis dan terintegrasi sebagai sumber keunggulan yang sulit ditiru. Hal ini harus didukung dengan regulasi internal yang fleksibel namun kuat dalam mengatur alur kerja, wewenang, dan akuntabilitas intelijen. Dengan demikian, kualitas dan kecepatan laporan informasi intelijen Polairud tidak hanya optimal secara teknis, tetapi juga secara kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesis bahwa optimalisasi kualitas dan kecepatan laporan informasi intelijen Polri di Wilayah Maritim Ditpolairud Polda Kalimantan Timur harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Setiap tahapan dalam siklus intelijen membutuhkan strategi yang spesifik, mulai dari perencanaan berbasis data, pengumpulan dengan teknologi canggih, pemrosesan digital, analisis mendalam, diseminasi real-time, hingga evaluasi berbasis umpan balik. Semua strategi tersebut akan menjadi efektif apabila didukung oleh pengelolaan SDM yang unggul dan pemanfaatan teknologi sebagai aset strategis organisasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem intelijen Polairud harus dilihat tidak hanya sebagai kebutuhan operasional, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan keamanan maritim yang adaptif dan berdaya saing tinggi.

5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

a. Laporan informasi intelijen Polri di Wilayah Maritim Ditpolairud Polda Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius di hampir seluruh

tahap siklus intelijen. Mulai dari perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan taktis dan risiko aktual, pengumpulan data yang terhambat oleh keterbatasan SDM serta teknologi, hingga pemrosesan informasi yang belum maksimal karena belum didukung oleh sistem digital yang memadai. Proses analisis dan produksi laporan intelijen juga masih kurang mendalam, sering kali bersifat deskriptif tanpa menyajikan prediksi yang bernilai strategis. Diseminasi laporan yang lambat serta lemahnya evaluasi dan umpan balik dari lapangan semakin memperlemah efektivitas sistem intelijen secara keseluruhan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem intelijen harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh di setiap tahap siklus, agar laporan intelijen benar-benar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi ancaman kejahatan maritim.

b. Peran teknologi dan infrastruktur sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan peran intelijen Polairud dalam menjaga keamanan Wilayah Maritim Kalimantan Timur. Menurut Soerjono Soekanto, peran hanya dapat dijalankan secara optimal bila didukung oleh sarana, prasarana, dan keterampilan yang memadai, hal yang saat ini masih menjadi kendala di lingkungan Ditpolairud, terlebih keamanan maritim modern sangat bergantung pada maritime domain awareness, yang hanya bisa dicapai melalui penggunaan teknologi pemantauan, pemrosesan, dan integrasi informasi yang canggih serta terkoordinasi lintas sektor. Kurangnya ketersediaan sistem pemantauan laut, infrastruktur komunikasi, serta integrasi lintas lembaga menjadikan pelaporan intelijen tidak maksimal. Untuk itu, penguatan peran teknologi dan pembangunan infrastruktur intelijen menjadi strategi mendesak guna mewujudkan sistem keamanan laut yang proaktif, adaptif, dan kolaboratif.

c. Strategi optimalisasi kualitas dan kecepatan laporan intelijen harus dirancang berdasarkan pemahaman terhadap alur siklus intelijen (Kent) dan pentingnya pengelolaan sumber daya internal (RBV). Setiap tahap dalam intelligence cycle memerlukan intervensi strategis, mulai dari perencanaan berbasis data dan risiko, pengumpulan informasi dengan dukungan teknologi canggih, pemrosesan dan analisis data yang melibatkan SDM terlatih dan sistem digital, hingga distribusi serta pemanfaatan laporan secara real-time. Dalam kerangka RBV, SDM intelijen menjadi aset strategis yang harus terus dikembangkan melalui pelatihan, sertifikasi, serta penempatan berbasis kompetensi. Pengelolaan teknologi dan SDM sebagai sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan merupakan kunci menciptakan keunggulan institusional Polairud. Oleh karena itu, strategi optimalisasi laporan intelijen yang terintegrasi antara sistem, teknologi, dan SDM akan berkontribusi besar terhadap efektivitas pencegahan serta respons cepat terhadap berbagai bentuk ancaman di Wilayah Maritim Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syaiful, Halkis,M., Dhahiyat, Ahmad Prawira (2018), *Peran Instansi Penegak Hukum Dalam Mengatasi Perompakan Bersenjata Terhadap Nelayan Tradisional Di Perairan Provinsi Lampung Tahun 2016-2017*, Jurnal Keamanan Maritim | Volume 4 Nomor 1, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/download/227/209>
- Barney, Jay (2001) The RBV of The Firm : A Ten Years After 1991, Journal Management DOI : 10.1177/014920630102700601 <http://jom.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/6/625>
- Bueger, Christian (2015) The Understanding Maritime Security. Copenhagen : The Copenhagen University Publisher.
- Bueger, Christian (2015) What is maritime Security ? The Introduce, Wales : Cardiff University Press.
- Creswell, J.W (2011) The Research design : Pengantar Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Campuran. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Halkis,M., 2022, Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu pengantar, (trans. Philosophy of Science on Defense An introduction), Unhan Press, Bogor
- Kent, Sherman (1991) The Shermant Kent Center for Intelligence Analysis. London : Sherman Kent Center Publisher.
- Kudussalam, Aam (2024) Sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan antara Ditpolairud Polda Kalbar, KKP dan TNI AL dihadapkan pada nelayan asing di Wilayah Maritim Provinsi Kalbar, Jurnal Universitas Tanjung Pura, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Kuncorojati, Antonius Trias (2023) Peran Ditpolairud dalam menangani distrubusi bahan bakar minyak jenis tertentu bagi nelayan dalam wilaya perairan Kalbar (Studi Kasus di Ditpolairud Polda Kalbar) Jurnal Universitas Tanjungpura, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Prasetyo, Budi (2023) Peran Ditpolairud dalam meningkatkan patrol udara, Jurnal Strategi Pertahanan Udara Volume 9 Nomor 2. ISSN 2830-3490.



- Sanjaya, Rudi (2024) Efektifitas Pencegahan dan Penegakan hukum oleh Polairud terhadap tindak pidana perompakan kapal di perairan Indonesia (Tesis Universitas Sultan Agung Semarang), https://repository.unissula.ac.id/38475/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300508_fullpdf.pdf
- Soekanto, Soerjono (2009) Peranan Suatu Pengantar Sosiologi, Jakarta Rineka Eka Cipta Publisher.
- Winata, Rangga Yoga (2022) Kewenangan Ditpolairud Polda Lampung dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika, Jurnal Viva Themis Ilmu Hukum dan Humaniora Volume 5 Nomor 1. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index>.
- Yusnaldi, Albert Mamahit, D., Supartono, & Mhd Halkis. (2022). *Civil-military coordination of national resources management in local communities, Indonesia case study*. Journal of Scientific Papers Social Development and Security, 12(1), 95-103. <https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.10>